KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ancam Industri Skala Kecil: Simplifikasi Tarif Cukai Kudu Dibatalkan
Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ancam Industri Skala Kecil

Simplifikasi Tarif Cukai Kudu Dibatalkan

KETUA Pansus RUU Pertembakauan DPR Firman Soebagyo memprotesnya penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 yang tentang penyederhanaan tarif cukai tembakau alias simplifikasi tarif cukai. Menurutnya, penerapan PMK itu akan merugikan rakyat. Para pelaku industri kecil akan gulung tikar. Padahal, jutaan buruh linting kretek sangat tergantung hidupnya dari industri kretek nasional hasil tembakau (IHT).

Politisi senior Partai Golkar itu paham, penerapan PKM itu bertujuan meningkatkan penerimaan negara di tengah seretnya pajak. Namun, penerapan itu berpotensi menutup industri skala menengah ke bawah.

"Ini korbannya akan sangat besar, yaitu tutupnya lapangan kerja. Kehidupan petani menjadi terancam dan industri skala menengah ke bawah mengalami kebangkrutan. Dan yang paling ngeri adalah akan terjadi monopoli dan oligopoli yang luar biasa dalam industri ini," ucap Firman, di Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Agus Parmuji meminta Presiden Jokowi mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengenai bahaya PMK tadi. Dia ingin agar kebijakan simplifikasi tarif cukai tembakau tersebut ditunda dulu sambil dilakukan kajian kebijakan baru. Sebab, penerapan kebijakan tadi akan berdampak langsung terhadap petani tembakau.

"Kami meminta Presiden Jokowi untuk mengingatkan Menkeu agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Menkeu harus memerhatikan masukan semua kalangan terkait dalam pembuatan kebijakan," ucapnya.

Katan dia, klausul penyederhanaan tarif menjadi 5 layer akan mengakibatkan semua pabrikan nasional, dari skala besar hingga menengah dan kecil, berpotensi gulung tikar. Pasalnya, pabrikan itu tidak akan sanggup bersaing dengan pemain besar yang sudah mempunyai brand internasional. Selain itu, penggabungan tarif cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) Golongan 1A dan 1B juga akan memberangus SKT produk pabrikan yang masih bernapas Merah Putih.

"Dampak kebijakan simplifikasi tarif cukai yang paling berbahaya adalah penggunaan bahan baku impor yang akan meledak. Akibatnya, ke depan, rokok di Indonesia tetap ada tapi tanaman tembakau sudah tidak ada lagi," terangnya.

Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Kordat Wibowo ikut bicara. Kata dia, dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan industri kretek nasional, perusahaan IHT skala besar akan bertahan terhadap kebijakan simplifikasi. Sedangkan industri menengah ke bawah akan rentan.

Menurut Kordat, kebijakan itu berpotensi memperkuat oligopolistik di IHT. Sebab, industri kecil akan meminta pertolongan kepada industri besar. Ujungnya, perusahaan kecil dicaplok perusahaan besar.

"Simplifikasi membuka peluang bagi perusahaan mega besar menjadi lebih besar lagi dengan mengorbankan usaha kecil. Ini mengancam keberlangsungan industri kecil," ucapnya. ■ RMOL